

P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekononi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nuwang S, Curup, 10 Oktober 1970, beralamat di Jl. DI. Panjaitan Gg Buang Suharik RT. 02 RW. 02 Kel. Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 8 Januari 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah **No. 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/2011** .
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000,**.(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **10.800.000,**. (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **19 September 2011** dan berakhir pada tanggal **19 September 2014**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00565** a.n **Aminah** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Air Meles Bawah** Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 9.167.700,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 2.425.500,-
Denda Tungakan	: Rp. 3.276.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.15.869.200,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.15.869.200,- (Lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adiknya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2021 dan 15 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat dan menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp.15.869.200,- (Lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00565 atas nama Aminah sebagai pemilik hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Oktober 2009, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal 18 Februari 2019, 27 Maret 2019 dan 18 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS iska Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Fr Putra selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas

tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. 10 asal berdasarkan ketentuan p dan BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No (g) huruf.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas 7 tertanggal Desember dapat bertindak dalam perkara a quo 2020 untuk berperkara subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagai selaku Penggugat di pengadilan, ,wang SNU sedangkan Tergugat umur tahun 51, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, ketentuan Peraturan Mahkamah bahwa berdasarkan Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka ini yang nilai gugatannya kurang dari maka terhadap per Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ,bukan sengketa mengenai tanah ,tidak diadili oleh pengadilan khusus ,para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup ,dan Penggugat sudah melampirkan buktitertulis yang sudah dilegalisir , dibubuhi meterai dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi ;kewenangan Pengadilan Agama Curup

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka 1 ,Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, nggugat angka bahwa petitum gugatan Pe 2 ,Penggugat menuntut agar pengadilan telah ugratakan demi hukum bahwa Teynme ;Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, intai sehingga tidak dapat dim keterangannya;

Menimbang, Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bahwa bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi 4 materai dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan asliya,ukti tersebut b rena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat merupakan akta outentik ka publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal285 R.Bg. dan pasal2 ayat (1) huruf a dan pasal3 Undang- undang Nomor13 Tahun1985 jo Undang- undang Nomor10 Tahun2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi tan formil dan materil sebagai bukti tertulispersyara, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, ni hakim memberikan pertimbangan maka dalam hal i berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar PT di antara terjadinya perikatan. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Tergugat selaku nasabah PT. ,BPRS Safir Bengkulu sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pasal22 s/d. 25Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 mengatur tentang sahnya KUHPerdata suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi4)empat (syarat sebagai berikut :

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,

- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s.d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES 1320 tersebut dihubungkan dengan buku KUHPerdata (P. 1) maka akad perjanjian persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT / BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (kedua pihak yaitu setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sehat pikirannya yang sudah dewasa) dan syarat obyektif (hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'tarodhin an /minkum* secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun ;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syaria'ah telah tertuang dalam Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, "Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

3. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

4. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bukti bahwa berdasarkan (P.1) , harus dinyatakan bahwa di antara PT .BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, vacta untuk itu hakim berpendapat sesuai dengan asas berdasarkan pasalbe sunservanda 1338 KUHPerduta bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah (KHES) semua akad yang dibentuk bahwa “ sah berlaku sebagai nash syari secara 'ah bagi mereka yang mengadakan dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad ,akad” perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/ d Pasal 25 Ekonomi Kompilasi Hukum Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka hakim berpendapat bahwa perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/2011 tanggal 19 September 2011 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir g sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT Bengkulu yan. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES dan pasal 1320 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, ikatakan terjadinya wanprestasi bahwa untuk dapat d, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-antindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Murabahah, yang isinya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 36 bulan terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2014, dengan kewajiban membayar margin Rp. **10.80.000,-** (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

2. Bahwa setelah menerima fasilitas pembiayaan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran (wanprestasi), dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp9.167.700,- (Sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya tersebut, ditambah margin yang telah ditetapkan, terhitung sejak para Tergugat tidak membayar angsurannya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp.2.425.500,- (Dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), ditambah biaya denda dan biaya penyelesaian masalah sehingga secara keseluruhan para Tergugat berkewajiban membayar sejumlah **Rp.15.869.200,- (Lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam bukti(P.1) tidak menemukan Hakim adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai Ingebreke Stelling/anpa memerlukan peringatant/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad

perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' lah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/ ,omasiteguran atau shal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 janji secara tegas menentukan yang menyatakan "apabila per kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", Hakim oleh karena itu ktiberpendapat dengan menunjuk bu(P.4) Himbauan berupa surat Peringatan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat/Somasi I, 2 dan 3, Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada peringatan atau surat Himbauan dan Tergugat dengan memberikan surat teguran/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti(P.1) erjanjian pembiayaan akad p Murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/2011 tanggal 19 September 2011 klausul pasal dalam tersebut 4 memuat ketentuan bahwa pada bulan 19 tanggal angsuran pertama dibayar paling lambat pada September bulan 19 dan berakhir paling lambat tanggal 2011 Oktober tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan dengan 2014 (tiga puluh enam) 36 tersebut selamabulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut dengan sisa hutang Rp.9.167.700,-) -Sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh ua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian ked pembiayaan Murabahah bukti(P.1, dan menunjuk bukti(P. 2, P.3., P.4, Himbauan Pembayaran berupa surat, s Peringatan I Surat. d3 kepada ugat sebagai akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan Terg kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya

tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo pasal1238 KUHPerdara sebagai proses gugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari pendahuluan Tergugat sebanyak3)tiga (kali berturut-turut ,maka berpendapat Hakim perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban membayar angsuran, maka berdasarkan pasal36 KHES Jo1234 KUHPerdara dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasise, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi ,terlambatoleh karena itu gugatan Penggugat angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka3 agar melunasi seluruh penghukum Tergugat untukm Agama Pengadilan sejumlah Rp kepada Penggugat kewajibannya.15.687.500.-) ,Lima belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)dengan rincian , dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka sebagaimana7 :sebagai berikut

Sisa Hutang Pokok	: Rp.10.300.800,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 300.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 4.087.500,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.15.687.500,-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, memberikan pertimbangan untuk itu Hakim ini berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti(P. (1Tergugat dengan Penggugat bersama secara-erjanjian kad pa telah menandatangani sama 01000243 pembiayaan Murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011

tanggal 19 September 2011 dan setelah Hakim) mencermati bukti maka diperoleh data tersebut (1.-ini data berikut;

Menimbang, pasal bahwa berdasarkan 3 Akad Murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011 tanggal 19 September 2011 jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang diketahui bahwa disetujui adalah sejumlah Rp. 15.000.000,). Lima Belas Juta Rupiah (dengan kewajiban membayar marginnya Rp .10.800.000, . (Juta puluh Se ;(Delapan Ratus Rupiah

Menimbang, dan tunggakan sejumlah terhadap de bahwa Rp.2.425.500 ribu lima ratus empat ratus dua puluh lima juta Dua) -. rupiah) , hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Akad Murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011 tanggal 19 September , 2011 ada ketentuan bahwa) 1 (Denda diberlakukan apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama ,(2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan,) 3 (Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp36.) -.000 Tiga puluh enam ribu h) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang tersebut maka jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Tergugat menunggak

pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, di dalam bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ,dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, ketentuan pasal bahwa berdasarkan38 huruf(a) ariKompilasi Hukum Ekonomi Sy'ah, Pihak dalam akad yang bahwa ,membayar ganti rugi melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksidan ganti rugi yang boleh dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal1246 BiayaKUHPerdata “, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang ;”sedianya dapat diperolehnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, kan di dan ganti rugi yang diboleh antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 9.167.700,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 2.425.500,-
Denda Tungakan	: Rp. 3.276.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.15.869.200,-

Menimbang, han pembayaran pembiayaan bahwa dalam hal pemenu 01000243 akad perjanjian Murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011 tanggal 19September sudah ada jaminan yang diagunkan tersebut 2011 Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat yaitu(SHM) Nomor00565 atas nama

Aminah sebagai pemilik hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Oktober 2009(bukti) P.3) ,dan berdasarkan pasal 6akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01000243/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011tanggal 19September berpendapat penyelesaian kimHa ,2011, pemenuhan dan pelunasan akad tersebut dapat diselesaikan Penggugat perjanjian pembiayaan Murabahah melalui instrument penyelesaian agunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya maka;

Menimbang, ,dikabulkan bahwa karena gugatan Penggugatmaka sesuai ketentuan pasal 192ayat)1 (R.Bg biaya perkara dibebankan kepada gugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum Ter putusan ini;

Mempedomani perundang-udangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. ;seluruhnya gugatan Penggugat Mengabulkan
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan 01000243 murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/IX/ 2011tanggal 19 September Rp kepada Penggugat sejumlah 2011.15.869.200,) -Lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah(,;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.369.000,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim,

dto

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 9.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 369.000,-

(Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.